

Identifikasi Masalah untuk Penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto 2011-2015



Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada
www.kumoro.staff.ugm.ac.id

HP: 081 328 488 444

RPJMD & RKP sebagai Dokumen Rencana

“Planning is everything. Plans are nothing.”

(Helmuth Graf von Moltke, 1914)

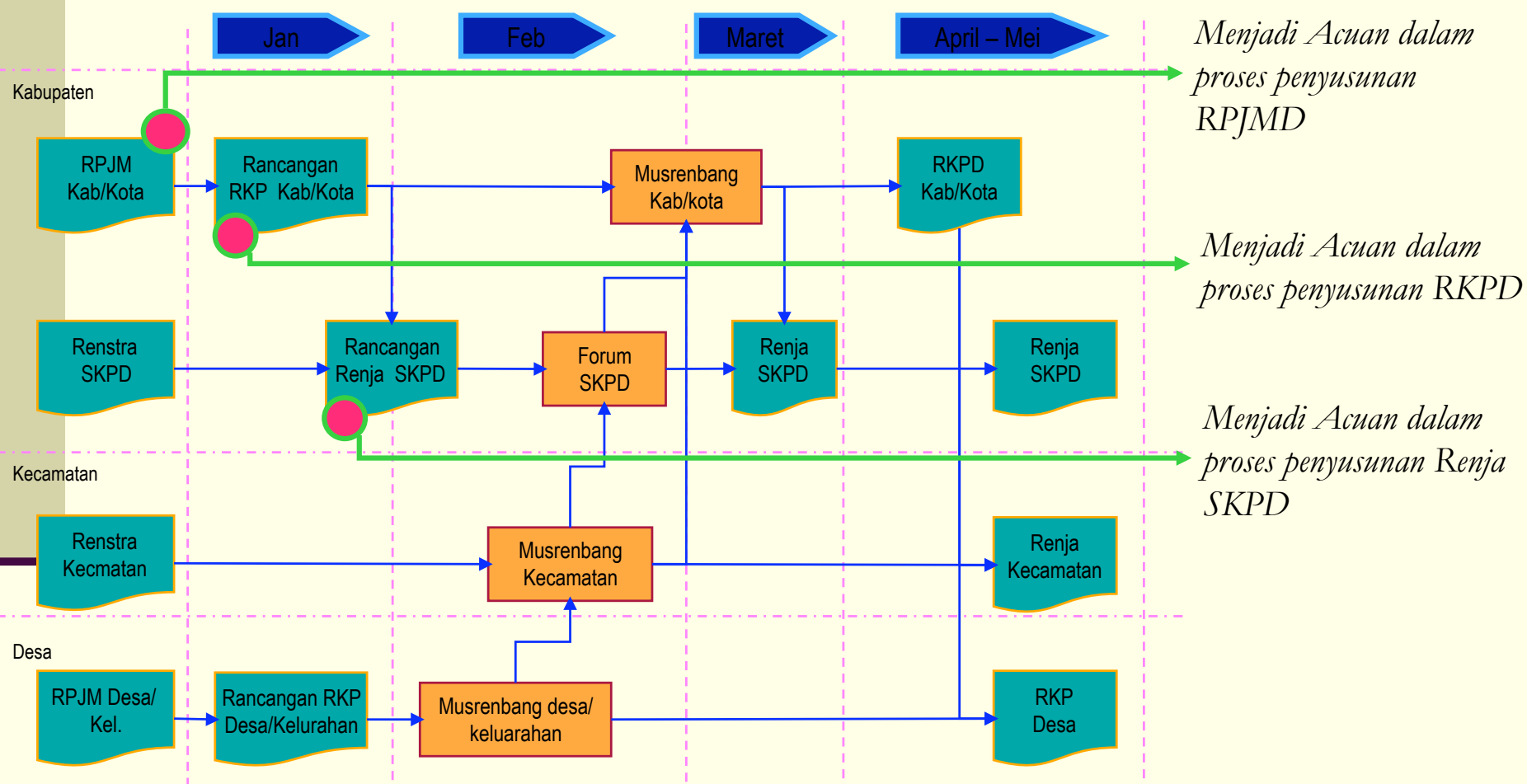
Tujuan perencanaan:

1. Mengurangi risiko
2. Mengurangi ketidakpastian
3. Mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik
4. Menciptakan kepercayaan (*trust*)
5. Menyampaikan informasi.

→ →→

Sebagai dokumen rencana, apakah RPJMD, RKP, Renstra dan Renja-SKPD dapat berfungsi dengan baik?

Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah



Kaitan antar Dokumen Rencana

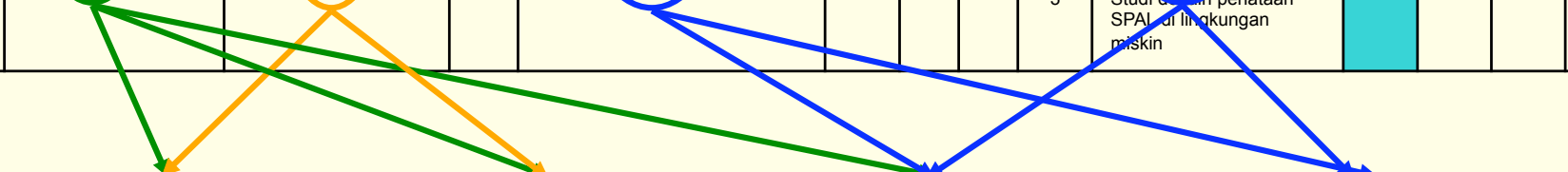
No	Permasalahan Dasar	Strategi	Rencana Tindak									Instansi	
			Ivestasi	Waktu			Non Investasi	Waktu					
				I	II	III		I	II	III			
I	KESEHATAN	Optimalisasi pengelolaan bendungan/waduk, menjadi sumber air bersih Identifikasi sumber air yang bisa dikelola sebagai sumber air bersih	1	Pembangunan sarana penampungan air bersih (PAH dan PAB) di sentra pemukiman masyarakat miskin				1	Pengelolaan air bersih berbasis masyarakat				Dinas PUD dan Kantor PDAM
			2	Pembangunan proyek perpipaan ke lokasi pemukiman penduduk miskin									
			3	Penyediaan hydran umum									
			4	Penambahan sarana mobil tangki									
	Kondisi pemukiman yang buruk karena tidak memiliki MCK Spal, serta rumah yang tidak layak huni sehingga masyarakat miskin rentan terhadap penyakit	Menciptakan pemukiman keluarga miskin yang sehat	1	Rehabilitasi dan penataan rumah layak huni				1	Studi pemetaan wilayah miskin yang sangat membutuhkan MCK Umum				Din Kes - PDAM
							2	Koordinasi dengan PDAM untuk menempatkan tempat penampungan air bersih					
							3	Studi desain penataan SPAL di lingkungan miskin					

RPJPD

RPJMD

RKPD

RENJA SKPD



Pertimbangan untuk Rencana dan Anggaran

1. Keterkaitan antara dokumen rencana dan anggaran sudah sesuai?
2. Prioritas anggaran sudah mencerminkan kebutuhan rakyat di daerah?
3. Alokasi dana APBD sudah mencerminkan akuntabilitas anggaran?
4. Peran aparat pemerintah sudah optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
5. Peran anggota DPRD sebagai wakil rakyat sudah mewarnai RPJMD, RKP, APBD dan prioritas pendanaan pembangunan?

Visi Kab Mojokerto

- **Visi:**

**TERWUJUDNYA KABUPATEN
MOJOKERTO YANG MANDIRI,
DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR DAN
BERMARTABAT.**

- Catatan: Apakah rumusan ini sudah menunjukkan apa yang akan dicapai 5 tahun mendatang?

Misi Kab Mojokerto

1. Mewujudkan SDM yang berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan ;
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional, dan adil dalam melayani masyarakat;
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan;
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka Integrasi Nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Daerah Harus SMART

- S (*Specific*): Spesifik, khas dan dapat dibedakan secara jelas satu sama lain.
- M (*Measurable*): Dapat diukur.
- A (*Action-Oriented*): Berorientasi pada tindakan, bukan sekadar motto atau slogan.
- R (*Realistic*): Didasarkan pada kemampuan dan potensi yang nyata.
- T (*Time-bound*): Punya target waktu untuk pelaksanaannya.

Contoh Sasaran Pembangunan Daerah Yang SMART (#1)

1. Kemiskinan turun, kesempatan kerja meningkat (Apa masing-masing ukurannya?)
2. Infrastruktur semakin baik (listrik 90% RT, jembatan Kali Putih, Sewon, 20 m; Kembangsari, Piyungan, 30 m)
3. Kesenjangan berkurang (Indeks Gini turun, 0,2474 th 2007 → 0,1973 th 2010)
4. Kualitas hidup masy meningkat (HDI menjadi 76)
5. Lingkungan hidup (rehab 2.000 Ha lahan kritis)
6. Kapasitas pemerintah daerah (SDM meningkat 10%, keuangan daerah 10%)
7. Partisipasi masyarakat dan swasta (Pemilu 83%; investasi swasta naik 10%).

Contoh Sasaran Pembangunan Daerah Yang SMART (#2)

8. Pelayanan masy semakin baik (penyelewengan turun 10%; SPM tercapai 80%)
9. Keadilan dan penegakan hukum (kriminalitas & Pekat turun 5%, konsistensi Perda 100%)
10. Kesetaraan gender (peningkatan peran perempuan, KDRT turun 5%)
11. Kecukupan pangan (gabah kering pungut 64,76 kw/ha; bawang merah 11,49 ton/ha)
12. Dunia usaha dan koperasi (TDI 350 unit usaha, PMA/ PMDN: 15 usaha & 350 usaha non-fasilitas)
13. Pariwisata (peningkatan kunjungan 10%)
14. Tata-ruang dan permukiman (mitigasi bencana 80%, penataan kawasan kumuh 50%).

MASALAH UMUM di Kabupaten Mojokerto (Agenda Legislasi)

1. Penduduk di bawah garis kemiskinan
2. Pengangguran
3. Rendahnya daya saing produk daerah
4. Produktivitas pertanian
5. Akses layanan pendidikan & kesehatan
6. Penegakan hukum & reformasi birokrasi
7. Dukungan infrastruktur
8. Kesenjangan antar wilayah.

Tabel 1. APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2010

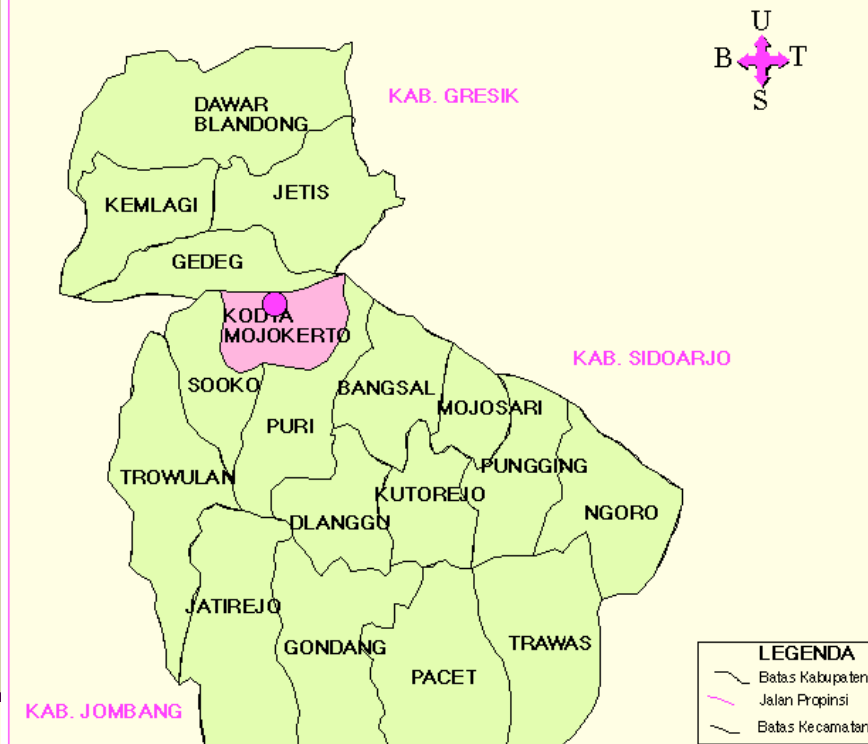
Uraian		Jumlah (miliar rupiah)	% Total Belanja APBD
Total Pendapatan		888,29	
	Pendapatan Asli Daerah	66,93	6,9
	Dana Perimbangan	655,08	69,1
	Lain-lain Pendapatan	3,05	
Total Belanja		964,06	100
Belanja Tidak Langsung		687,84	71,3
	Belanja pegawai	577,72	59,9
	Bantuan sosial	28,97	
	Bantuan keuangan	43,32	
	Belanja tidak terduga	2,41	
Belanja Langsung		276,21	28,6
	Belanja pegawai	53,54	
	Belanja barang & jasa	99,79	
	Belanja modal	122,87	12,7
Pembiayaan Daerah		75,76	
	SiLPA	86,12	8,9
	Pengeluaran	16,60	
Defisit		-75,76	

Tantangan Belanja Tidak Langsung

1. Kenaikan gaji PNS
2. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
3. Kenaikan TPAPD menjadi sebesar upah minimum Provinsi Jawa Timur
4. Kenaikan Alokasi Dana Desa

Rencana Harus Sesuai Potensi

PETA POTENSI KABUPATEN MOJOKERTO



KETERANGAN

Anyaman Bambu
Dawar, Puri
Jumlah Unit Usaha Th 1995 sebanyak : 50 Unit
Jumlah Produksi :

PAHDE BESI
Gedeg, Pungging, Trowulan
Jumlah Unit Usaha Th 1995 sebanyak : 36 Unit
Jumlah Produksi :

PISANG CAVENDIS
Gondang
Jumlah Unit Usaha Th 1995 sebanyak : 1 Unit
Jumlah Produksi : 12.203,2 ton

PETA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR



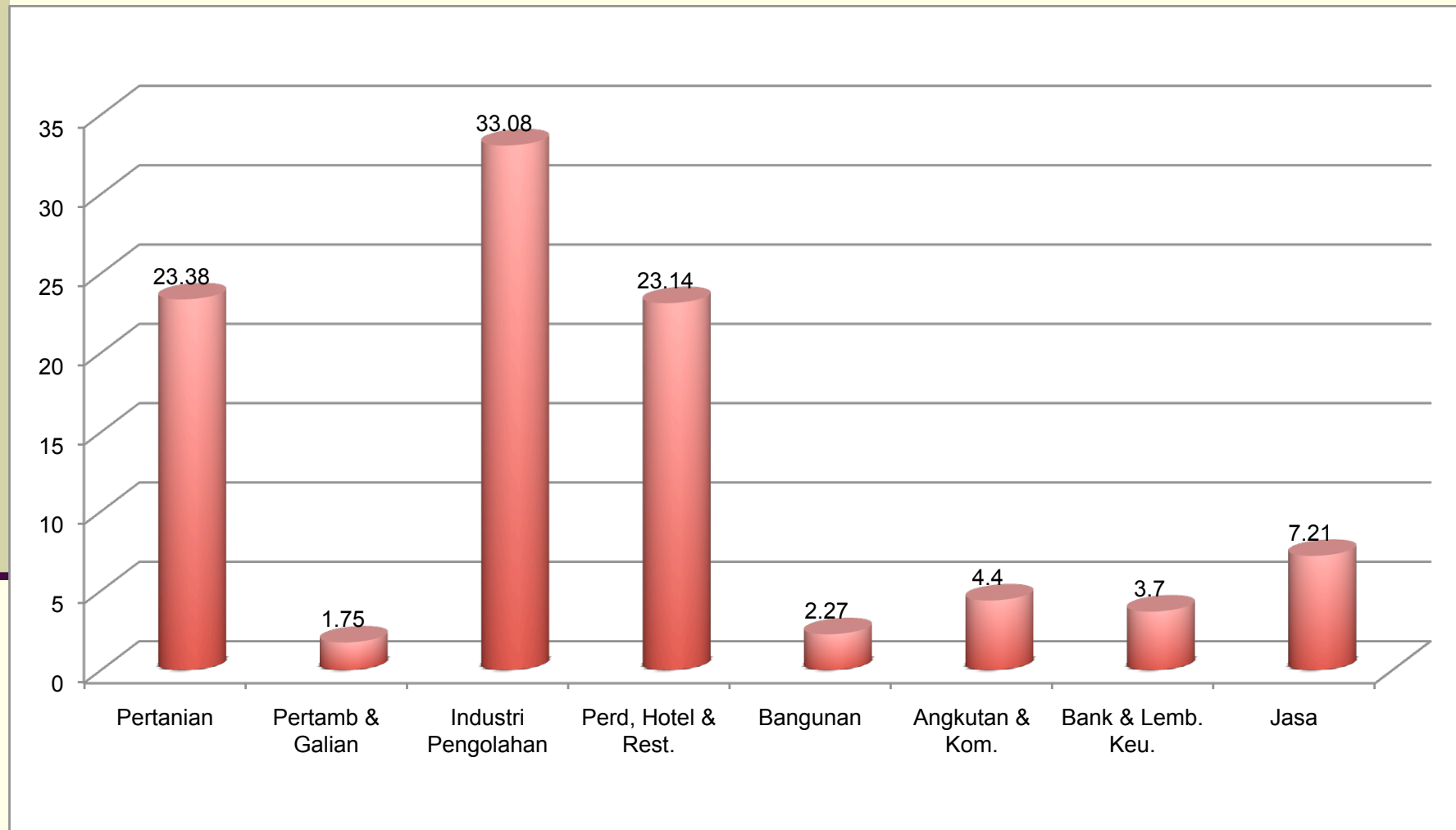
Ekonomi Kab Mojokerto ditunjang sebagian besar oleh sektor industri pengolahan (33,08%), pertanian (23,38%), dan perdagangan (23,14%). Adakah sektor lain yang potensial?

PRODUK UNGGULAN MOJOKERTO

1. Industri bordir (Kec. Sooko, Puri, Mojosari)
2. Industri kerajinan fiber / gift (Kec Trowulan)
3. Telur asin, bebek asap, day-old duck (Kec. Mojosari & Bangsal)
4. Industri jamur (Kec Gondang & Pacet)
5. Industri kacang mete (Kec Ngoro)
6. Pisang Cavendis (Kec Gondang)
7. Tape ketan hitam (Kec Pacet).

Catatan: Kebanyakan potensi ekonomi di Mojokerto ditunjang oleh sektor primer (pertanian, industri pengolahan).

Penyumbang PDRB Mojokerto Menurut Lapangan Usaha Th. 2007 (%)



Isu Pokok Pembangunan di Kabupaten Mojokerto

- Infrastruktur penunjang komoditas agri-bisnis dan industri kecil. Mis: Bagaimana nasib pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono? → Terganjil pembebasan lahan?
- Tingkat efisiensi industri kecil yg rendah. Mis: ICOR industri alas-kaki (3.8) yg masih belum kompetitif.
- Pendidikan masyarakat rendah (penduduk 833.651 jiwa; pencari kerja tahun 2008: 66,8% lulus SMA, 14,7% lulus Diploma, 11,5% SMTP, 4,3% SD, dan hanya 2,5% yang lulus sarjana).
- Modal pokok: kultur, stabilitas politik, komitmen perumus kebijakan. → Bagaimana pengembangan di masa mendatang?

Peran DPRD

Dalam Perumusan RPJMD

- Pertimbangkan seluruh warga masyarakat, bukan hanya konstituen.
- Budaya “nrimo” adalah modal bagi stabilitas politik, tetapi hindari budaya “mumpung isih njabat”.
- Mojokerto punya warisan budaya sangat tinggi (Museum Trowulan, peninggalan Majapahit).. → potensi pariwisata? Apakah masa lalu ini tidak ada bekasnya lagi?
- Tingkatkan belanja modal dari anggaran, buat program yg langsung menyentuh kebutuhan pokok rakyat.
- Rumuskan program berbasis industri pengolahan, agri-bisnis dan jasa (pariwisata).

Rakyat Mojokerto menunggu rumusan RPJMD yang realistis dan menyentuh langsung kebutuhan mereka. Inilah bentuk pertanggungjawaban moral para wakil rakyat di DPRD.

■ **TERIMA KASIH**